

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman etnis. Sejak zaman dahulu, sebagian besar wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang hidup berkabilah-kabilah (bersuku-suku).<sup>1</sup> Setiap suku akan berupaya untuk mempertahankan wilayah yang ditempatinya. Bahkan tak jarang terjadi perang antarsuku. Menurut George Lenzowsky, Timur Tengah memiliki posisi geografis pada pertemuan Eropa, Asia dan Afrika. Timur Tengah merupakan sebutan dari orang-orang Eropa dalam melihat posisi wilayah jajahan di masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yaitu Timur Dekat, Timur Tengah, dan Timur Jauh. Menurut Lenzowsky secara politis dan kultural, Timur Tengah bisa dibagi ke dalam dua wilayah utama, yaitu Sabuk Utara dan Inti Arab. Sabuk Utara diisi oleh etnis non Arab dan berbatasan langsung dengan Rusia, seperti Turki dan Iran. Sedangkan Inti Arab merupakan wilayah yang mayoritas diisi oleh etnis Arab seperti Arab Saudi, Irak, Yaman, Kuwait, Oman, Mesir, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.<sup>2</sup>

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pada tahun 610-661 suku-suku di Timur Tengah pernah terintegrasi di bawah payung Pemerintahan Islam.<sup>3</sup> Jiwa kesukuan di Timur Tengah pernah mampu dihilangkan oleh Nabi Muhammad

---

<sup>1</sup> *Bangsa Arab*. Diakses melalui <http://badiklat.kemhan.go.id/index.php/berita-pusbahasa/713-bangsa-arab> pada 8 Desember 2013 pukul 10.06 WIB

<sup>2</sup> George Lenzowski. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. terj Drs Asgar Bixby. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1993) hal 78

<sup>3</sup> Pemerintahan Islam yang dimaksud adalah pada masa Nabi Muhammad hingga Khalifah Ali bin Abi Thalib

SAW beserta Khulafaurrasyidin<sup>4</sup>. Dalam bukunya yang berjudul “*The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History*” dan diterbitkan tahun 1978, Michael H. Hart mengatakan bahwa Muhammad merupakan tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Hart mencatat bahwa Muhammad mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar, terbelakang dan terpecah belah oleh sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan kemiliteran.<sup>5</sup>

Sejak berakhirnya masa Khulafaurrasyidin tahun 661, egoisme kesukuan kembali muncul. Hal ini terbukti dengan berdirinya kerajaan Islam yang diatasnamakan etnis dan keluarga. Seperti Dinasti Bani Umayyah tahun 661-750 yang berpusat di Damaskus dan Dinasti Bani Abbasiyah tahun 750-1258 yang berpusat di Baghdad. Kerajaan-kerajaan tersebut berupaya merangkul setiap etnis yang ada di kawasan Timur Tengah untuk berada di bawah pemerintahannya. Seperti yang juga dilakukan oleh kerajaan Islam terakhir di Timur Tengah, Dinasti Turki Usmani. Bahkan Turki Usmani memiliki wilayah kekuasaan yang lebih luas mencakup tiga benua yaitu Asia, Afrika dan Eropa.<sup>6</sup>

Namun pada awal abad kedua puluh, bermula dari kekalahan Turki Usmani yang menjadi bagian dari pihak Sentral dalam Perang Dunia I, banyak

---

<sup>4</sup> Khulafaurrasyidin merupakan 4 sahabat Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

<sup>5</sup> *Mengapa Nabi Muhammad di Peringkat Pertama 100 orang Paling Berpengaruh di Dunia?* diakses melalui <http://syaamilquran.com/mengapa-nabi-muhammad-di-peringkat-pertama-100-orang-paling-berpengaruh.html> pada 17 Desember 2013 pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> *Makalah Sejarah Peradaban Islam di Timur Tengah*. Diakses melalui <http://www.isomwebs.net/2013-04/makalah-sejarah-peradaban-islam-di-timur-tengah/> pada 18 Desember 2013 pukul 12.55 WIB

wilayah kekuasaan Turki Usmani yang berhasil direbut oleh negara-negara Sekutu seperti Inggris dan Perancis. Di samping itu, beberapa etnis yang berada di bawah kekuasaan Turki Usmani juga meminta lepas dari Pemerintahan Kerajaan Islam itu. Kurdi merupakan salah satu etnis yang meminta lepas disebabkan oleh ancaman yang sering mereka dapatkan dalam setiap pertempuran yang dilakoni Turki Usmani serta kondisi ekonomi kerajaan yang telah defisit. Akhirnya, bermodal kedudukan sebagai anggota tetap badan *Council LBB*, Inggris yang pada waktu itu telah menguasai wilayah Mesopotamia berniat membantu Etnis Kurdi memperoleh kemerdekaannya sekaligus memperkecil wilayah kekuasaan Turki Usmani serta menerapkan sistem negara bangsa. Pada tahun 1920 ditandatangani perjanjian Sevres oleh Khalifah Turki Usmani dan Sekutu (Inggris) yang di antara isinya menjanjikan kemerdekaan Kurdistan dengan wilayah yang ditempati oleh seluruh Etnis Kurdi.<sup>7</sup>

Namun berselang tiga tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa mengganti Perjanjian Sevres dengan Perjanjian Lausanne yang di dalamnya sama sekali tidak dibahas sedikitpun tentang negara Kurdistan. Yang ada justru pembagian wilayah kekuasaan beberapa negara yang dampaknya adalah Kurdistan (Tanah Etnis Kurdi) terbagi ke dalam 5 negara yaitu Kurdi Utara (Turki) yang memiliki wilayah terluas, yakni 194.000 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 13 juta jiwa; Kurdi Timur (Iran) yang memiliki wilayah terluas kedua, yakni 125.000 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 8 juta jiwa; Kurdi Selatan (Irak) yang memiliki wilayah terluas ketiga, yakni 72.000 kilometer persegi dengan penduduk 6 juta jiwa; Kurdi Barat (Suriah) yang memiliki wilayah terluas keempat, yakni

---

<sup>7</sup> George Lenczowski. *Op.cit.* hal 68. Wilayah Etnis Kurdi yang dimaksud berdasarkan usulan *Society for the Ascension of Kurdistan* dalam *Paris Peace Conference* pada tahun 1919

18.000 kilometer persegi dengan penduduk 2 juta jiwa; dan Kurdi Armenia (bekas Uni Soviet) yang memiliki luas 400 kilometer persegi dengan penduduk 400 ribu jiwa.<sup>8</sup>

Dari kenyataan tersebut, terlihat bahwa keanekaragaman etnis di Timur Tengah membuat sistem negara bangsa yang lahir sebagai dampak dari imperialisme dan kolonialisme Eropa menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Betapa tidak, hingga saat ini Etnis Kurdi di kelima negara terus memperjuangkan hak mereka, khususnya mendirikan negara Kurdistan. Etnis Kurdi sebagai Etnis minoritas seringkali dimarjinalkan bahkan terancam dihapuskan identitasnya sebagai *sub-state identity*<sup>9</sup> di negara-negara tersebut. Di antara Etnis Kurdi yang paling keras memperjuangkan kemerdekaan Kurdistan adalah Etnis Kurdi di Irak. Dibanding dengan Etnis Kurdi di negara lain, di Irak Etnis Kurdi telah memulai pemberontakannya lebih awal yaitu sejak ditetapkannya Perjanjian Lausanne tahun 1923 hingga akhirnya berdirilah *Kurdistan Democratic Party* (KDP) tahun 1946. Di samping memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak, ketidakadilan yang diterima dari Pemerintah Irak juga menjadi penyebab semakin kuatnya upaya untuk keluar dari negara tersebut.

Di dalam perjanjian Sevres, di samping menjanjikan kemerdekaan kepada Etnis Kurdi, juga ditetapkan bahwa wilayah Mesopotamia (Irak), Palestina (termasuk Tranjordan) dan Suriah (termasuk Libanon) diberikan kemerdekaan oleh Turki Usmani dengan Mesopotamia (Irak), Palestina (termasuk Tranjordan) menjadi mandat Inggris. Sedangkan Suriah (termasuk Libanon) menjadi mandat

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 92

<sup>9</sup> *Sub-state identity* merupakan identitas yang berada dalam sebuah negara berdasarkan nilai, norma, budaya, bahasa dan ideologi

Perancis. Irak telah menjadi negara kerajaan bentukan Inggris pada tahun 1921. Sejak disahkannya perjanjian Leusanne sebagai pengganti perjanjian Sevres tahun 1923, Etnis Kurdi yang berada di wilayah Utara Irak masuk ke dalam wilayah Kerajaan Irak.<sup>10</sup>

Di Irak walaupun Etnis Kurdi mendapatkan otonomi, namun nasib mereka tidaklah baik. Etnis Kurdi di Irak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan otonomi. Berbagai peperangan dilakoni etnis ini dengan Pemerintah Irak sebelum akhirnya memperoleh otonomi pada tahun 1970 dari Presiden Ahmed Hasan Al-Bakr.<sup>11</sup> Namun tidak termasuk di dalamnya wilayah Mosul dan Kirkuk yang merupakan penyumbang 30% minyak Irak. Bahkan beberapa pemimpin KDP yang berdomisili di wilayah tersebut dipaksa Pemerintah Irak pindah ke wilayah Barat Irak. Pemerintah Irak mengkhawatirkan jika Mosul dan Kirkuk berada di bawah kendali negara otonomi Kurdistan, maka akan membuka peluang Etnis Kurdi untuk memisahkan diri dari Irak. Sehingga perekonomian Etnis Kurdi tetap harus bergantung pada Pemerintahan Irak. Setiap kali ada upaya perebutan Mosul dan Kirkuk, Pemerintah Irak langsung mengerahkan kekuatan militer hingga ratusan nyawapun melayang.<sup>12</sup>

Pada saat Pemerintahan Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, Etnis Kurdi di Irak semakin tertindas. Sebagai seorang pemimpin yang mendukung Pan Arabisme dan berasal dari Partai Baath, Saddam Hussein menginginkan Irak hanya diisi oleh Etnis Arab. Saddam Hussein terus menyerang

---

<sup>10</sup> *Sejarah Negara Irak*. Diakses melalui <http://rudisony.wordpress.com/2009/07/29/sejarah-negara-irak/> pada 19 Desember 2013 pukul 7:10 WIB

<sup>11</sup> Rommy Fibri dan Ahmad Taufik. *Detik-Detik Kematian Saddam Hussein, Kesaksian Wartawan TEMPO dari Baghdad Irak*. (Jakarta : Pusat Data dan Analisa TEMPO, 2008) hal 104

<sup>12</sup>Mustafa Abd Rahman. *Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam..* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas). hal 210

wilayah Kurdi di Utara Irak. Bahkan upaya Saddam Hussein mencapai puncaknya saat dilakukan penyerangan Kampanye Anfal dengan salah satu alasan pengkhianatan yang dilakukan Etnis Kurdi Irak dalam Perang Teluk I. Serangan ini tercatat sebagai pelanggaran Hukum Internasional sehingga Saddam Husseinpun dijatuhi hukuman mati pada tahun 2004. Kampanye Anfal merupakan rangkaian eksekusi massal dan meratakan perkampungan Kurdi di Utara Irak dengan menggunakan senjata kimia pemusnah massal termasuk dalam serangan Irak ke Halabja dengan menggunakan gas Mustard dan Sarin pada Maret 1988.<sup>13</sup>

Sejak tahun 2003 Etnis Kurdi di Irak tidak lagi dihantui oleh serangan dan gempuran dari Pemerintah Irak, bahkan Presiden Irak saat inipun adalah Jalal Talabani yang merupakan pendiri salah satu partai Kurdi yaitu *Patriotik Union of Kurdistan* (PUK). Namun sebelumnya dalam upaya pemenangan pemilu tahun 2005 Kurdi dimintai janji oleh Amerika Serikat dan Pemerintahan Irak bahwa jika mereka mendapatkan peran politik yang tinggi di Irak maka tidak akan pernah ada perubahan peta Timur Tengah yang artinya Kurdi Irak mengurungkan niatnya memerdekakan diri dan akan setia pada Pemerintahan Irak.<sup>14</sup> Dengan diangkatnya Jalal Talabani sebagai Presiden Irak, maka cita-cita mendirikan sebuah negara Kurdistan telah semakin jauh dari Etnis Kurdi Irak.

Sehingga berangkat dari dinamika perjuangan Etnis Kurdi dalam mendirikan negara Kurdistan serta kebijakan politik Pemerintah Irak terhadap

---

<sup>13</sup> Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah*. (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989) hlm 140. Kampanye Anfal diberlakukan setelah Pemerintah Irak melakukan Arabisasi di seluruh wilayah Irak yang kemudian disusul oleh perlawanan kelompok minoritas Irak terutama Etnis Kurdi pada awal rezim Saddam Husein. Kampanye Anfal merupakan sandi dalam operasi militer anti-Kurdi yang diambil dari surat Al-Anfal dalam Al-Qur'an yang berjumlah 78 ayat yang memiliki arti rampasan perang. Kandungan ayatnya memungkinkan umat Islam untuk membunuh orang-orang kafir, mengambil barang-barang mereka, termasuk wanita dan anak-anak perempuan untuk dijadikan sebagai budak. Namun kebanyakan ahli tafsir menyalahkan penafsiran Saddam Husein akan surat tersebut.

<sup>14</sup> Eka Ribut Saputra. *Skripsi : Upaya Etnis Kurdi dalam Mendapatkan Peran Politik di Irak Pasca Rezim Saddam Hussein*. (Yogyakarta : HI UPN Veteran, 2011) hal 4-5

Etnis Kurdi sebagai salah satu *sub state identity* sekaligus etnis minoritas di negara tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaplikasian kepentingan (*interest*) dari Pemerintah Irak lewat kebijakannya terhadap Etnis Kurdi.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Berbagai kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi sangat mengganggu pergerakan etnis tersebut untuk keluar dan mendirikan negara Kurdistan. Bahkan identitas dan keselamatan mereka pun terancam. Dengan berbagai alasan seperti wilayah Mosul dan Kirkuk di bagian Utara sebagai penghasil 30% minyak Irak dan pengkhianatan Kurdi dalam perang Teluk I, Etnis Kurdi tidak dapat menikmati kehidupan di tanah yang telah lama mereka diami. Puncaknya terjadi pada serangan Kampanye Anfal pada 1988 yang dilakukan Pemerintahan Irak di bawah kendali Partai Baath yang sangat mendukung Pan Arabisme. Pada tahun 2005, pasca kekejaman rezim Saddam Hussein, Etnis Kurdi diberikan ruang untuk menduduki pemerintahan bahkan menjadi Presiden Irak. Namun merekapun dimintai janji oleh Amerika Serikat dan Pemerintahan Irak untuk mengurungkan niat keluar dari Republik Irak. Sehingga kebijakan politik Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi sebagai upaya konstruksi sosial menjadi penting untuk diteliti dalam melihat sulitnya perjuangan Etnis Kurdi di Irak untuk keluar dan mendirikan negara Kurdistan.

## **1. 3. Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah : ***Bagaimana kebijakan politik Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi?***

#### **1. 4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menggambarkan kebijakan Pemerintah Irak dalam hal politik terhadap Etnis Kurdi sebagai upaya konstruksi sosial termasuk perubahan pasca pergantian rezim penguasa.
2. Menganalisis dan memahami kebijakan politik Pemerintah Irak sebagai wujud *practice* yang lahir dari manifestasi kepentingan (*interest*) terhadap Etnis Kurdi.

#### **1. 5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai heterogenitas etnis di Timur Tengah dan interaksi antar etnis tersebut khususnya antara etnis mayoritas dan penguasa dengan etnis minoritas di suatu negara yang salah satunya bisa dilihat dari kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi.
2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional tentang kebijakan Pemerintah Irak sebagai wujud *practice* yang lahir dari manifestasi kepentingan (*interest*) terhadap Etnis Kurdi.
3. Memahami penerapan alat analisis seperti teori dan konsep dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional.



## 1. 6. Studi Pustaka

Ada beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi tersebut akan dijadikan referensi utama dalam penelitian ini. Diantaranya adalah buku “*The International Politic in The Middle East*” yang ditulis oleh **Raymond Hinebusch**. Buku ini berangkat dari keanekaragaman etnis di Timur Tengah, dimana etnis-etnis tersebut dipecah oleh sistem negara bangsa. Salah satu etnis yang dilihat adalah Arab sebagai identitas bersama sebagian besar masyarakat di Timur Tengah, namun pada akhirnya harus dipecah menjadi beberapa negara dengan teritorial tertentu. Jika dilihat dari segi territorial, Arab berada di tengah-tengah kawasan Timur Tengah. Namun karena sistem negara bangsa, maka bangsa Arab di pinggirannya harus bergabung dengan etnis lain dalam sebuah negara. Inilah yang pada akhirnya memicu terjadinya konflik di Timur Tengah.<sup>15</sup>

Dalam buku ini Raymond berpendapat bahwa konflik di Timur Tengah tidak cukup jika hanya dilihat dari segi material saja. Dalam artian bahwa kondisi konflik yang berlarut-larut tersebut adalah bukti dari sistem internasional yang anarki seperti yang dikatakan oleh orang-orang Realist. Namun, di Timur Tengah terjadi ketidakcocokan antara identitas dan sistem negara bangsa. Sehingga solusi yang seharusnya diberikan adalah mengintegrasikan semua masyarakat di Timur Tengah ke dalam *supra state identity* seperti Arab dan Islam yang telah diaplikasikan dalam bentuk Pan Arabisme dan Pan Islamisme.<sup>16</sup>

Kemudian Raymond juga menjelaskan bahwa dalam melihat konflik di Timur Tengah, perlu memperhatikan kemajemukan *sub-state identity* yang ada di

---

<sup>15</sup> Raymond Hinebusch. *International Politics in The Middle East*. (UK : Manchester University Press, 2003) hal 54

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 56. *Supra state identity* merupakan identitas yang lahir dari pengintegrasian identitas-identitas yang sama yang berada di berbagai negara.

negara yang terlibat konflik. Di Timur Tengah pada umumnya, kemajemukan ini justru menimbulkan konflik yang tiada habisnya. Sehingga analisis proses pembentukan negara menjadi sangat penting dalam melihat dinamika konflik di Timur Tengah.<sup>17</sup>

Menurut peneliti buku ini bisa menjadi landasan dalam asumsi bahwa konflik antara Pemerintah Irak dengan Etnis Kurdi berawal dari penerapan sistem negara bangsa yang menyebabkan Etnis Kurdi terpecah ke dalam beberapa negara. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai *sub-state identity* yang bermuara pada persaingan politik antar *sub-state identity* yang berada di dalam satu negara untuk memperoleh kekuasaan dengan membawa nilai yang dianutnya. Sehingga dengan demikian peneliti bisa terbantu dalam melihat kebijakan yang dijalankan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi.

Studi selanjutnya adalah terkait kondisi Etnis Kurdi Irak beserta kebijakan Pemerintah Irak dalam menghambat perjuangan Etnis Kurdi dalam mendirikan negara Kurdistan. Studi ini diharapkan bisa menggambarkan bagaimana kebijakan dijalankan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi. Diantaranya adalah buku yang berjudul *The Kurds in Iraq, The Past, Present and Future?* yang ditulis oleh **Kerim Yildiz**. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004. Buku ini menggambarkan bagaimana nasib dan kondisi Etnis Kurdi di masa lalu, masa sekarang dan ramalan masa depan. Masa lalu yang dimaksud adalah masa sejak sebagian Etnis Kurdi bergabung dengan Kerajaan Irak tahun 1923 hingga berakhirnya masa Saddam Hussein tahun 2003. Masalah yang dihadapi Kurdi pada masa itu seperti serangan militer, embargo ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan wilayah

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 71

tempat tinggal mereka. Masa sekarang adalah tahun 2003 – 2004 dimana kebebasan politik telah mulai diterapkan di Irak termasuk kepada Etnis Kurdi. Sedangkan masa yang akan datang adalah setelah tahun 2004.<sup>18</sup>

Dalam buku ini juga diterangkan adanya keterlibatan pihak luar dalam menentukan nasib Kurdi, seperti Turki, Iran dan Amerika Serikat. Pasca Perang Teluk I, Pemerintah Irak menyatakan bahwa Etnis Kurdi telah berkhianat dan membantu Iran pada perang tersebut. Kondisi ini berujung pada dilakukannya Kampanye Anfal oleh Saddam Hussein tahun 1988. Turki juga pernah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Otonomi Kurdistan di Irak sejak tahun 1988 yang berdampak pada serangan yang semakin besar dari Pemerintahan Saddam Hussein dan memanasnya hubungan Irak dan Turki pada waktu itu. Sedangkan Amerika Serikat muncul sebagai penyelamat Kurdi atas keganasan rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Namun kondisi ini sama sekali tidak menuntun etnis tersebut ke arah kemerdekaan.<sup>19</sup>

Kurdi memiliki identitas yang berbeda dengan etnis-etnis lain termasuk Arab yang diantaranya bisa dilihat dari asal-usul, bahasa dan agama. Perbedaan ini telah mengundang berbagai kekejian terhadap Etnis Kurdi di semua negara yang mereka diami. Seperti pengrusakan desa dan evakuasi, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dalam tahanan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran HAM lainnya. Di samping itu, cara lain juga tetap dilakukan seperti upaya kerjasama antara Pemerintah dan Etnis Kurdi namun tetap dengan tujuan menekan Etnis Kurdi untuk tidak keluar dari negara-negara tersebut. Mendirikan

---

<sup>18</sup> Kerim Yildiz. *The Kurds in Iraq, The Past, Present and Future*. (London : Pluto Press, 2004) hal 1

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 2-3

negara Kurdistan hingga saat ini barulah mimpi yang tidak pasti kapan akan menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

Berakhirnya rezim Saddam Hussein dan dibukanya peluang politik bagi Kurdi di negara Irak belum mengubah nasib etnis tersebut. Mereka masih tetap hidup miskin dan larut dalam duka akibat kehilangan anggota keluarga pasca kampanye Anfal dan Perang Irak. Sehingga buku ini juga mempertanyakan apakah Amerika Serikat dan Sekutu merupakan sahabat atau musuh bagi Etnis Kurdi. Seakan Kurdi hanya bertaruk untuk kuda pemenang.<sup>21</sup>

Kemudian buku yang berjudul *Ghosts of Halabja?* yang ditulis oleh **Michael J. Kelly**. Buku ini menggambarkan bagaimana upaya Arabisasi yang dilakukan oleh Saddam Hussein terhadap Etnis Kurdi di Utara Irak, khususnya di wilayah Mosul dan Kirkuk. Diantaranya adalah pengusuran terhadap para petani Kurdi dan pengambilalihan lahan oleh petani Arab. Di dalam buku ini Kelly juga menggambarkan kegembiraan yang dirasakan oleh Etnis Kurdi khususnya, terhadap eksekusi mati Saddam Hussein pada tahun 2003. Alasan mereka adalah pembantaian dan pemusnahan Etnis Kurdi yang pernah dilakukan oleh Saddam Hussein dalam rangkaian Kampanye Anfal. Diantara rangkaian kampanye tersebut yang paling ganas adalah serangan ke Halabja tahun 1988.<sup>22</sup>

Di samping itu di dalam buku ini, Kelly juga menggambarkan bahwa perpecahan politik pada Etnis Kurdi di Utara Irak dengan adanya *Kurdishan Democratic Party* (Partai Demokrasi Kurdistan/KDP) dan *Patriotic Union of Kurdistan* (Uni Patriotik Kurdistan/PUK) membuat Pemerintahan Irak di bawah

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal 51-55

<sup>21</sup> *Ibid.* hal 192

<sup>22</sup> Michael J. Kelly. *Ghosts of Halabja*. (USA : Greenwood Publishing Group Inc, 2008) hal 2-3

kendali Saddam Hussein bisa memainkan perannya guna menciptakan konflik bahkan perang antar Etnis Kurdi dengan imbalan bantuan ekonomi dari Baghdad ke partai-partai tersebut.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengacu pada buku yang mengkaji tentang sejarah dan dinamika pergerakan Etnis di Timur Tengah yang ditulis oleh **George Lenczowski** yang diterjemahkan oleh **Asgar Bixby** yang berjudul “*Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*” dan diterbitkan tahun 1992. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana kondisi dari berbagai Etnis di Timur Tengah di bawah penguasaan Dinasti Turki Usmani. Diantaranya adalah bagaimana pergerakan Etnis Arab, Turki dan Kurdi. Ketiga Etnis ini ternyata sama-sama berkeinginan untuk keluar dari Turki Usmani dan mendirikan negara sendiri. Turki yang merupakan penguasa Turki Usmanipun ternyata juga menginginkan pemerintahan sendiri. Sehingga muncullah gerakan revolusioner Turki yang sebelum runtuhnya Turki Usmani dikenal dengan gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk. Attaturk sempat meminta Etnis Arab untuk bergabung dan menguasai Pemerintahan Turki Usmani. Hubungan ini dikenal dengan istilah *Al-Ikha al-Arabi Al-Uthmani*. Namun, kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan kemelut tidak dapat dielakkan. Para cendekiawan Arab menolak politik sentralisasi Turki Muda dan juga berkeberatan atas tidak seimbangannya komposisi Dewan Perwakilan Rakyat hasil revolusi tahun 1908. Dari total 245 wakil, 150 adalah orang Turki dan hanya 60 orang Arab. Sedangkan Kurdi merupakan minoritas Islam lainnya di wilayah Turki Usmani. Kurdi sering menjadi masalah bagi Turki Usmani. Etnis ini sering menentang penguasa guna meraih

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal 20

kemerdekaan. Dari pemaparan di atas, terlihat bagaimana setiap etnis di Timur Tengah berkeinginan untuk memiliki pemerintahan sendiri yang homogen.<sup>24</sup>

Di samping itu, dalam buku ini juga digambarkan bagaimana akhirnya Turki Usmani runtuh dan melakoni berbagai peperangan dengan negara-negara Eropa seperti Inggris dan Perancis. Sehingga perjanjian Sevres dan Lausanne pun muncul sebagai penanda berakhirnya masa kekuasaan Turki Usmani. Buku ini juga membahas dinamika politik di berbagai negara pasca Turki Usmani runtuh seperti di Irak, Iran, Turki, Afganistan, Suriah, Mesir, Israel, Yordania, Arab Saudi dan Yaman.<sup>25</sup>

Dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi tidak cukup jika hanya melihat dari satu arah saja. Artinya perlu juga melihat pergerakan dan perjuangan Etnis Kurdi sebagai pemicu dibuatnya kebijakan oleh Pemerintah Irak. Sejatinya dalam struktur sosial, interaksi yang terjalin tidaklah satu arah, tetapi interaksi yang bersifat intersubjektif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti juga mengacu pada sebuah jurnal yang ditulis oleh dosen Universitas Diponegoro yaitu **Tunggul Ganggas Danisworo, Tri Cahyo Utomo, dan Puji Astuti** pada tahun 2013 yang berjudul "*Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012)?*" Etnis Kurdi merupakan salah satu etnis yang hidup di beberapa negara di Timur Tengah, mereka memiliki cita-cita dan ambisi menciptakan negara Kurdistan yang merdeka dan berdaulat. Namun setelah Perang Dunia I berakhir, tepatnya tahun 1923 mereka harus tinggal terpisah karena daerah Kurdistan oleh LBB dibagi menjadi beberapa negara berdaulat (Iran, Irak, Suriah, dan Turki). Etnis Kurdi di Irak dalam sejarahnya

---

<sup>24</sup> George Lenczowsky. Terj Asgar Bixby. *Op.cit.* hal 78-84

<sup>25</sup> *Ibid.* hal 78-296

merupakan etnis Kurdi yang paling agresif dalam menyampaikan aspirasinya dibandingkan dengan Etnis Kurdi di negara lain. Mereka menciptakan sebuah gerakan nasionalisme etnis yang digunakan dalam rangka menuntut aspirasi mereka yaitu kemerdekaan Kurdi. Dimulai pada tahun 1919, Syakh Mahmud Barzanji mendeklarasikan perjuangan Kurdi di Irak lewat pemberontakan yang lebih dikenal sebagai revolusi Sulaimaniyah. Tidak terakomodasinya kepentingan Kurdi Irak oleh berbagai rezim yang silih berganti menguasai Irak, membuat pemberontakan etnis Kurdi di Irak terus berlanjut sampai akhirnya Irak dikuasai oleh rezim otoriter Partai Baath yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Periode rezim Saddam Hussein merupakan periode terberat dalam sejarah Etnis Kurdi. Berbagai kebijakan pembersihan Etnis Kurdi Irak mulai digencarkan oleh rezim otoriter Saddam Hussein, namun di saat itu pula gerakan nasionalisme Etnis Kurdi di Irak semakin bertambah kuat.<sup>26</sup>

Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola strategi gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak pada masa kekuasaan Saddam Hussein hingga proses demokrasi masuk ke Irak (periode 1979-2012), serta menjelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan dalam rangka mengakomodasi kepentingan Etnis Kurdi di Irak selama periode tersebut. Jurnal ini juga menjelaskan konflik-konflik kontemporer yang melibatkan Etnis Kurdi Irak sebagai salah aktor dalam konflik tersebut. Sehingga pada jurnal ini dapat dilihat bagaimana perubahan bentuk pola-pola gerakan nasionalisme Kurdi Irak

---

<sup>26</sup> Tunggal Ganggas Danisworo dkk. Jurnal, *Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012)*. (Semarang : UNDIP, 2013) hal 9-10

dari masa ke masa serta pengaruhnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Irak terhadap Etnis Kurdi.<sup>27</sup>

### **1. 7. Kerangka Pemikiran**

Penggunaan perspektif atau pendekatan dalam penelitian adalah sangat penting sebagai pusat acuan atau pemandu dalam proses analisis. Penggunaan perspektif juga untuk menjaga ketepatan suatu penelitian ketika tujuan penelitian hendak dicapai.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif Konstruktivisme.

Kebanyakan dari peneliti terdahulu dalam meneliti konflik Timur Tengah sering kali menggunakan perspektif rasionalis positivis sebagai kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan perspektif lain yaitu Konstruktivisme yang merupakan *via media* antara teori rasionalis-positivis dan teori reflektivis-pospositivis. Konstruktivisme lahir dari rahim kamp reflektivis pospositivis dan tetap mengusung semangat anti positivisme, namun perspektif ini memiliki orientasi pada produksi dan reproduksi *sciences* (ilmu pengetahuan) sebagai *problem solving* bagi persoalan-persoalan kemanusiaan yang merupakan tugas yang dianggap telah disepelekan oleh para dekonstruktif di kamp reflektivis pospositivis. Namun ilmu pengetahuan yang dimaksud konstruktivis berbeda dengan konsepsi kaum rasionalis positivis. Konstruktivis tidak pernah berhasrat membuat klaim hegemonik tentang suatu kebenaran pengetahuan atau menetapkan standarisasi jalan menuju kebenaran tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 11

<sup>28</sup> Yanuar Ikbar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2012) hal 88

<sup>29</sup> *Ibid.* hal 68



Asumsi dasar dari konstruktivisme adalah pertama, setiap tindakan agen didasarkan pada ide dan identitas yang diperoleh dari hasil interaksinya dengan lingkungan sosial. Ide secara sederhana bisa dipahami sebagai bagaimana suatu agen memandang dan memaknai agen lain. Sehingga adanya ide mencerminkan identitas atau ciri dari agen tersebut yang membedakannya dengan agen yang lain. Konstruktivisme beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Negara (agen) akan berpengaruh terhadap bentuk sistem internasional. Begitupun sebaliknya, sistem internasional tersebut juga akan berpengaruh terhadap perilaku negara. Kedua, pandangan mengenai sistem internasional yang anarki. Dalam sistem anarki terdapat interaksi–interaksi antar agen. Kemudian, dalam interaksi antar agen itu terjadi proses mempengaruhi antar agen sehingga interaksi antar agen itu memberikan bentuk terhadap sistem internasional. Hal ini bertentangan dengan realisme yang menyatakan bahwa realita hubungan internasional bersifat anarki dimana anarki tersebut bersifat *given*. Ketiga, konstruktivisme memfokuskan kajiannya terhadap persoalan mengenai bagaimana pembentukan ide dan identitas. Maka dengan demikian, konstruktivisme menjadi kubu ketiga perdebatan HI yang diperhitungkan.<sup>30</sup>

Dalam ranah ontologi yaitu apa saja isi dunia sosial dan bagaimana unsur-unsur di dalamnya bekerja, pertama tama konstruktivisme meyakini bahwa manusia akan selalu berinteraksi dalam keberagaman kelompok-kelompok sosial (etnik, ideologi, agama, gender, dan lainnya), termasuk negara. Setiap orang akan berupaya dengan cara mereka membuat dan mengubah lingkungan tempat mereka tinggal. Sehingga individu, kelompok bahkan negara (*agent*) tidak hanya dibentuk

---

<sup>30</sup> Robert Jackson dan George Sorensen. *Introduction to International Relations*. (New York: Oxford University Press Inc, 1999) hal 164-167

oleh dunia mereka (*social structure*), tetapi mereka juga mampu mengubahnya. Konstruktivisme mencirikan hubungan interaktif antara apa yang orang lakukan dan bagaimana masyarakat membentuk tindakan mereka sebagai “*mutually constitutive*” antara struktur dan agen.<sup>31</sup>

Secara epistemologi atau bagaimana dunia itu dikaji, konstruktivisme menyetujui bahwa pengetahuan haruslah objektif, dalam arti peneliti bukan yang menentukan pilihan-pilihan atas nilai-nilainya, baik atau buruk. Karena itu konstruktivis tidak mau menyebut dirinya sebagai kaum relativis. Namun dalam pemahaman dan pemaparan selalu bersifat subjektif karena sejatinya semua peneliti terlibat dalam penafsiran, mulai dalam mengumpulkan bukti dan ketika membuat pilihan tentang pertanyaan apa yang digunakan dalam penelitian.<sup>32</sup>

Alexander Wendt dalam teorinya menggambarkan bahwa struktur-struktur material tidak bisa berdiri sendiri dalam hubungan internasional, karena melalui ide-idealah makna sosial sesungguhnya akan terungkap. Menurut Wendt, eksistensi realitas konstruktivisme selalu bersifat subyektif yang tidak hanya pada konteks materi melainkan juga dunia sosial. Di dalam hubungan internasional Wendt membangun argumennya dengan memusatkan perhatiannya pada Negara dan sistem Negara. Dalam pandangannya, struktur berbeda dengan proses. Proses meliputi interaksi antaragen yang terdapat *shared idea* di dalamnya. Menurut Wendt *self-help*<sup>33</sup> dan politik-politik kekuasaan yang digadang-gadangkan oleh

---

<sup>31</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch.. *Strategis for Reserch in Constructivist IR.*(New York : M.E.Sharpe, Armonk, 2007) hal 6-7. *Mutually Constitutive* adalah agen bertindak menuju struktur dengan aplikasi atau didasari oleh *meaning* dalam struktur itu.

<sup>32</sup> Ibid. hal 11-12

<sup>33</sup> *Self-help* bagi realis yaitu tidak ada satu negarapun yang berani menjamin keamanan dan eksistensinya secara struktural baik dibidang domestik maupun internasional, dengan kata lain dalam hal ini tidak ada teman dan musuh yang abadi yang ada hanyalah kepentingan nasional yang sejati.

kaum realis dan neorealis tidak mengikuti kelogisan ataupun kausalitas dari sistem yang anarki. Saat ini jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya berada dalam dunia yang *self-help*, maka itu semua adalah proses konstruksi, bukan struktur.<sup>34</sup>

### **1.7.1. Agent and Structure**

Agen secara sederhana bisa dipahami sebagai aktor yang terlibat berinteraksi di dalam struktur. Namun struktur dalam konstruktivisme berbeda dengan struktur dalam teori strukturalis. Struktur dalam konstruktivisme bisa diartikan sebagai lingkungan sosial. Interaksi agen dalam struktur sosial menyebabkan terjadinya dinamika sosial. Agen bisa berbentuk personal, lembaga, negara maupun institusi tertentu. Namun menurut Wendt, agen yang menjadi pusat dan memegang peranan sentral adalah negara, dengan kata lain negara adalah aktor utama dalam struktur sosial, karena negara memiliki kekuatan secara institusi untuk merubah struktur sosial.<sup>35</sup> Secara umum, ontologi dalam konstruktivisme juga bergantung dalam tiga komponen, yaitu : intersubjektivitas, konteks dan power.

Dalam pandangan konstruktivisme, pemahaman intersubjektif melibatkan agen dan struktur, bukan hanya agen/subjek saja. Hal ini disebabkan oleh nilai, norma, bahasa, budaya dan ideologi merupakan diantara fenomena sosial yang menciptakan identitas dan membimbing tindakan para agen. Di samping itu, konstruktivis juga membawa misi mengangkat derajat subjek/agen dari keterpurukannya selama ini akibat hegemoni struktur. Namun dalam pemahaman

---

<sup>34</sup>Barry Buzan dan Richard Little (ed). *Constructivism and International Relation Alexander Wendt and His Critics*. (New York : Routledge 2 Park Square, 2006) hal 36

<sup>35</sup>Michelle Maiese, *Essay Social Structural Change*, (Boulder : University of Colorado, 2003) hal 2

intersubjektif perlu diingat bahwa intersubjektif tidaklah bersifat statis dari waktu ke waktu karena dipengaruhi oleh perubahan konteks. Sebagai contoh, seseorang mungkin mencirikan kapitalisme kontemporer sebagai sebuah ideologi yang mencakup konsep uang berdasarkan nilai tukar bukan emas, dan legitimasi upah buruh bukan perbudakan. Namun kapitalisme memanifestasikan dirinya berbeda dari waktu ke waktu. Perubahan konteks dalam intersubjektif ini juga dipengaruhi oleh interaksi di masa lalu yang menyebabkan suatu agen mampu berkuasa dalam struktur sosial. Sebagai contoh, penobatan AS dan Uni Soviet sebagai negara adidaya pada Perang Dingin karena menjadi agen utama dalam sistem internasional pada saat itu. Kondisi ini bisa dijadikan acuan dalam interaksi antar agen di masa berikutnya.<sup>36</sup>

Karakteristik penting dari agen adalah interaksi, dan dalam interaksi terdapat proses pertukaran nilai melalui *shared idea* yang bersifat intersubjektif antar agen yang juga dikenal dengan istilah lain dalam Konstruktivisme yaitu *practice*.<sup>37</sup> Alexander Wendt dalam tulisannya yang berjudul “*New Approaches to International Theory?*”, berasumsi bahwa *idea*, *identity*, dan *interest* merupakan hasil dari praktek intersubjektif di antara aktor-aktor. Selain itu Wendt juga menyatakan bahwa *collective meaning*<sup>38</sup> menentukan struktur yang mengatur tindakan-tindakan kita. Dan agen-agen memperoleh *idea*, *identity*, dan *interest* melalui partisipasi di dalam *collective meaning* tersebut.

Struktur dihasilkan melalui interaksi antar agen. Seperti halnya dalam kerjasama internasional, melalui praktek diplomasi, lembaga memenuhi fungsinya

---

<sup>36</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch. *Op.cit.* hal 7-11

<sup>37</sup> Christian Reus Smit, Jurnal, “*Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism?*” (*European Journal of International Relations*, Vol.4, 1998), hal 333

<sup>38</sup> *Collective meaning* merupakan suatu pengetahuan yang dimasukkan kepada komunitas atau kelompok.

yang mencerminkan pemahaman bersama untuk menyediakan order, menstabilkan ekspektasi aktor, dan mengelola hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, struktur dipandang sebagai media bagi agen dalam mendistribusikan ide-ide (*ideas*) kepada agen lainnya dan mendorong agen untuk menentukan nilai serta norma yang berlaku dalam struktur tersebut.<sup>39</sup>

Jika rasionalis positivis mendoktrinkan bahwa struktur internasional tidak lain merupakan distribusi kapabilitas material saja, konstruktivis meyakini sebaliknya bahwa struktur internasional adalah distribusi ide, dan agen – agen bertindak mengikuti pola persebaran ide. Pola persebaran kapabilitas material pun dimaknakan sesuai dengan pola persebaran ide tersebut. Dalam pandangan Wendt, Konstruktivisme merupakan teori struktural sistem internasional yang klaim-klaim intinya sebagai berikut : (1) negara merupakan unit analisis prinsipil bagi teori politik internasional; (2) struktur utama dalam sistem negara lebih bersifat intersubyektif daripada bersifat material; (3) identitas dan kepentingan negara lebih membangun struktur-struktur sosial tersebut daripada diserahkan secara eksogen pada sistem yang telah ada.

### **1.7.2. *Idea and Identity***

Ide merupakan rancangan yang tersusun dalam fikiran berupa gagasan terhadap suatu hal. Artinya pada interaksi dalam struktur sosial ide mengandung pemaknaan ataupun pandangan terhadap agen. Munculnya ide akan seiring sejalan dengan munculnya identitas karena munculnya identitas disebabkan oleh kesadaran diri akan perbedaan terhadap agen lain. Ide dibangun oleh nilai, norma,

---

<sup>39</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch. *Op.cit.* hal 26-27

agama, ideologi serta *meanings* yang didapatkannya dalam lingkungan sosial. *Meanings* merupakan pemahaman yang muncul dalam melihat atau merespon interaksi antar dua agen yang berisikan simbol berupa perkataan, tingkah laku dan lain-lain di dalamnya. Dengan adanya ide, maka akan mempengaruhi *interest* dan *practice* agen dalam merespon lingkungan sekitarnya.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini ide yang dimaksud adalah bagaimana Pemerintah Irak memandang Etnis Kurdi, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan ontologi “*mutually constitutive*” antara agen dan struktur, Konstruktivisme melihat identitas sebagai hubungan sosial yang berubah dari waktu ke waktu dan di berbagai konteks. Identitas agen terbentuk akibat respon dari aspek material dan proses *shared idea* dalam struktur sosial. *Shared idea* ini memiliki tiga fungsi yaitu : ketika suatu agen berinteraksi dengan agen lain yang memiliki karakter mirip dengannya, ketika suatu agen berinteraksi dengan agen lain yang merupakan musuhnya dan bagaimana menangani musuh tersebut. *Shared idea* tersebut berisi ide-ide yang dimiliki agen tentang agen lain.<sup>41</sup>

Wendt meyakini bahwa identitas dan kepentingan (*interest*) negara dipengaruhi oleh struktur yang ada. Identitas dan kepentingan (*interest*) tersebut tentunya akan mempengaruhi agen yang lain. Seperti dalam pemikiran Marxist yang mengatakan bahwa negara didominasi oleh kaum borjuis, namun bagi Konstruktivis pada hakikatnya identitas mempengaruhi penempatan manusia ke dalam kelas tertentu, baik borjuis, proletar dan lain-lain.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Robert Jackson dan George Sorensen. *Op.cit*

<sup>41</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch. *Op.cit.* hal 65

<sup>42</sup> *Ibid.* hal 66

Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana interaksi yang terjadi di antara Irak dan Kurdi yang menyebabkan Kurdi harus tetap patuh dan tunduk kepada Irak karena menjadi bagian dari negara tersebut. Perbedaan identitas dari keduanya pada akhirnya sangat merugikan Etnis Kurdi yang ingin sekali memisahkan diri dan mendirikan negara Kurdistan.

Identitas secara sosial akan menentukan jenis lingkungan anarki atau keamanan yang manakah yang akan berlaku. Seharusnya menurut Wendt, perlu ada penekanan pada format *collective identity*, dimana identitas tersebut secara kolektif tergantung pada bagaimana kepentingan itu didefinisikan. Serta berdasarkan atas masalah apa dan sejauh mana identitas sosial melibatkan sebuah identifikasi dengan kondisi akhir identitas lainnya.<sup>43</sup> Apa yang dikatakan Wendt ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan dari etnis di Timur Tengah berkeinginan untuk bersatu di dalam identitas yang sama. Diantaranya dapat dilihat dari upaya Pan-Arabisme di Timur Tengah.

Identitas kolektif merupakan identitas yang melekat pada kelompok dan didapat melalui proses interaksi dan adanya kesadaran tindakan dan tujuan bersama. Identitas kolektif menekankan tujuan positif dengan menjadikan yang lainnya juga sedemikian rupa sehingga mereka juga secara kognitif merupakan bagian dari diri tersebut dan kesejahteraan merupakan perhatiannya. Para aktor yang memiliki identitas kolektif menggambarkan kepentingan mereka atas sebuah level agregasi yang lebih tinggi yang berdasarkan pada perasaan-perasaan atas solidaritas, komunitas dan loyalitas. Poin-poin tersebut tidak mengartikan bahwa kepentingan sendiri (*self-interested*) akan ditempatkan dalam satu

---

<sup>43</sup> Barry Buzan dan Richard Little. *Op.cit.* hal 57

kolektivitas melainkan kerjasama untuk menyamakan identitas aktor. Maka dalam pemahaman atas identitas, Wendt mengharuskan kita memfokuskan atas hubungan antara “apa yang dilakukan oleh para aktor” dan “siapakah mereka”.<sup>44</sup>

Raymond Hinnebusch dengan pendekatan konstruktivisme dalam bukunya yang berjudul *The International Politics of The Middle East* memaparkan dua konsep terkait identitas di Timur Tengah, yaitu *Supra State Identity* dan *Sub State Identity*. Kedua konsep ini dipaparkan untuk menanggapi persoalan konflik berkepanjangan di Timur Tengah serta kritik terhadap sistem negara bangsa. *Supra State Identity* mirip dengan *collective identity* yang disampaikan oleh Wendt. *Supra State Identity* yang pernah ada dan diupayakan adalah Arab dan Islam yaitu diciptakannya Pan Arabisme dan Pan Islamisme. Kedua identitas ini merupakan identitas dominan di Timur Tengah. Namun pada akhirnya terkendala oleh sistem negara bangsa karena mayoritas negara memiliki banyak *sub state identity*. *Sub State Identity* merupakan identitas-identitas yang dimiliki suatu negara yang dibangun berdasarkan etnis (*tribe*), dan agama (termasuk *religion sect* seperti Sunni dan Syi’ah dalam Islam). Menurut Raymond, sistem negara bangsa hanya bisa diterapkan kepada masyarakat yang hidup menetap seperti petani. Timur Tengah diisi oleh orang-orang yang suka berdagang dan sering berpindah-pindah (*nomaden*). Di samping itu, Timur Tengah di masa lalu khususnya sering diisi oleh aktivitas ekspor – impor budak. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan negara-negara di Timur Tengah memiliki banyak *sub-state identity*. Kondisi ini menyebabkan struktur yang terbentuk lebih bersifat konflikual. Negara sebagai

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal 58-60



agen utama tidak mampu memperbaiki keadaan bahkan ikut berpartisipasi dalam memperoleh kepentingannya (konstruksi ide) melalui kebijakannya.<sup>45</sup>

Menurut Konstruktivisme identitas agen akan berubah sejalan dengan perubahan struktur. Raymond berpendapat bahwa di saat interaksi antar agen tidak berjalan dengan baik, maka struktur yang muncul mengharuskan setiap agen mengangkat identitas mereka masing-masing dan berkepentingan untuk berkuasa dan keluar dari negara yang mereka tempati serta menjadi negara sendiri. Seperti yang terjadi pada Etnis Kurdi yang berada sedikitnya di lima negara yaitu Turki, Irak, Iran, Suriah dan Armenia. Di samping memiliki sejarah pernah dijanjikan kemerdekaan oleh LBB, struktur yang ada juga menyebabkan Etnis Kurdi menentang kebijakan Pemerintah dan berjuang pada keinginan untuk keluar, termasuk di Irak.

Penelitian ini juga membahas tentang adanya upaya politik yang dimainkan oleh negara sebagai *agent* yang dominan dalam interaksi intersubjektif. Hal ini bisa terlihat dari apa yang disampaikan Raymond tentang *Sub State Identity* bahwa keberagaman agen akan mengharuskan dilakukannya upaya politik oleh Etnis mayoritas terhadap Etnis minoritas. Apalagi Etnis mayoritas tersebut telah menguasai negara sebagai agen korporasi yang universal sehingga bisa menggunakan kebijakan negara dalam memperoleh kepentingannya (*interest*).

### **1.7.3. Interest and Practice**

Identitas akan mempengaruhi interaksi antar agen yang diadopsi sebagai *interest* yang bermuara pada rumusan kebijakan negara (*practice*).<sup>46</sup> Pasca Perang

---

<sup>45</sup> Raymond Hinebusch. *Op.cit.* hal 54-55

Dunia II, konsep *interest* kerap disejajarkan dengan *Power*. Dimana *Power* dimaknai sebagai *military capability* dan *interest* serta diartikan sebagai ego mutlak dari tujuan keamanan, kesejahteraan, dan kekuasaan atau *power*. Konsep ini dikritik oleh Alexander Wendt yang mengatakan bahwa *interest* bukan merupakan produk dari kapasitas materi suatu negara yang bersifat absolut, melainkan sebuah konstruksi dari penyaringan ide yang terbentuk juga karena faktor identitas negara tersebut.<sup>47</sup>

Tindakan militer dapat digunakan untuk menghadapi ancaman eksternal, tetapi definisi siapa atau apa yang harus dilindungi dalam menentukan kesesuaian atau kemandirian sistem persenjataan. Sehingga ide akan berperan untuk menentukan kepentingan agen terhadap kawan dan lawan. Seperti halnya tindakan (*practice*) Irak terhadap Etnis Kurdi. Sejatinnya Etnis Arab dan Kurdi di Irak berada dalam negara yang sama. Namun identitas mereka berbeda sehingga menimbulkan kepentingan yang berbeda pula. Kepentingan ini akan diaplikasikan lewat *practice* berupa kebijakan negara. Oleh karena itu, sejak berdirinya Kerajaan Irak tahun 1920, Etnis Kurdi selalu ditekan dan tidak dibiarkan untuk menguasai kekayaan alam Irak seperti di Mosul dan Kirkuk yang telah lama didiami oleh Etnis Kurdi. Bahkan sejak tahun 1950an hingga 1990an partai yang mengatasnamakan Kurdi seperti KDP dilarang di Irak. Pada masa rezim Partai Baath di bawah kendali Saddam Hussein, bangsa Kurdi harus menjadi korban pada pembantaian Kampanye Anfal yang merupakan salah satu upaya arabisasi di Irak. Pemerintahan Saddam Hussein berkeinginan agar Irak hanya diisi oleh Etnis Arab. Hingga saat ini walaupun Kurdi telah menduduki pemerintahan, namun

---

<sup>46</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch.. *Op.cit.* hal 75-82

<sup>47</sup> Cecep Zakarias. *Op.cit.* hal 96

mereka harus mengurungkan niatnya untuk membangun negara dengan identitas sendiri, yaitu Kurdistan.

## 1. 8. Metodologi Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini, peneliti mengacu pada buku karya Audie Klotz dan Cecelia Lynch yang berjudul *Strategies for Research in Constructivist IR*. Buku ini menjelaskan bahwa untuk mengkaji suatu fenomena sosial dalam penelitian dibutuhkan seperangkat alat untuk mendefinisikan makna dan relasi antar variabel.<sup>48</sup> Metode pada dasarnya merupakan proses pengujian terhadap teori dan pendekatan tertentu dengan menggunakan berbagai alat penelitian dalam permasalahan tertentu. Metode ilmiah biasanya akan menggunakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena dilakukan secara sistematis, terkontrol dan teruji.<sup>49</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *understanding* dan perspektif konstruktivisme. Diantara tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian dengan pendekatan konstruktivisme identik dengan pemaknaan beberapa konsep dasar. Sehingga kemudian mampu diinterpretasikan kepada masalah yang sedang diteliti. Seorang peneliti dituntut memahami konsep dan variabel masalah dengan baik. Sehingga fakta-fakta yang ada di lapangan mampu dipahami karena pada dasarnya pemahaman seorang ilmuan tentang fakta yang ingin diteliti adalah hasil proses intersubjektif dia

---

<sup>48</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch. *Op.cit.* hal 15

<sup>49</sup> Yanuar Ikbar. *Op.cit.* hal 103

dalam interaksi sosialnya.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap kebijakan yang dijalankan Irak terhadap Etnis Kurdi dengan menggunakan elemen-elemen dasar dalam penelitian konstruktivisme.

### **1.8.1. Batasan Masalah**

Objek utama dalam penelitian ini adalah kebijakan Irak terhadap Etnis Kurdi yang sekaligus sebagai upaya konstruksi sosial melalui representasi ideasional seperti nilai, norma, agama, ideologi dan *meanings* serta representasi material seperti ekonomi dan keamanan yang dimunculkan oleh agen (Pemerintah Irak) dalam interaksinya dengan agen lain seperti Amerika Serikat yang bermuara pada terjadinya dinamika kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi. Agar penelitian ini tidak meluas dari rumusan masalah, maka peneliti membatasi pada gambaran dan analisa kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi di Irak dari tahun 1979-2013. Hal ini disebabkan oleh pada kurun waktu tersebut terjadi dinamika kebijakan Pemerintahan Irak terhadap Etnis Kurdi seiring juga dengan terjadinya dinamika intensitas perlawanan oleh Etnis Kurdi. Sehingga sangat menarik untuk diteliti. Di antara dinamika kebijakan itu adalah dilakukannya Kampanye Anfal oleh Pemerintah Irak tahun 1988, dibukanya ruang politik bagi Kurdi di Irak sejak 2005 dan masih banyak lagi kebijakan dan peristiwa penting lainnya.

Kemudian untuk memudahkan dan memfokuskan peneliti dalam mencari data, maka peneliti akan fokus pada beberapa elemen dasar dalam penelitian konstruktivisme seperti yang disampaikan Audie Klotz dan Cecelia Lynch dalam bukunya "*Strategies for Research in Constructivist IR?*" yaitu :

---

<sup>50</sup> Audie Klotz dan Cecelia Lynch. *Op.cit.* hal 16-17

1. *Agent* dalam penelitian ini adalah Pemerintah Irak, Amerika Serikat dan Etnis Kurdi (*Sub state actor*)
2. *Structure* dalam penelitian ini adalah lingkungan sosial di Irak.
3. *Idea* yang dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Irak memandang Etnis Kurdi baik sebelum maupun setelah invasi AS ke Irak tahun 2003. Begitu juga sebaliknya, bagaimana Etnis Kurdi memandang Pemerintah Irak baik sebelum maupun setelah invasi AS ke Irak tahun 2003.
4. *Interest* dimunculkan melalui pengaplikasian ide oleh setiap agen. Seperti adanya ide bahwa Kurdi adalah musuh bagi Irak sehingga kepentingan Irak untuk menghilangkan identitas Kurdi.
5. *Practice* merupakan manifestasi dari ide dalam bentuk interaksi antar agen. *Practice* di sini adalah dalam bentuk penerapan kebijakan Pemerintah Irak terhadap Kurdi, seperti arabisasi di Irak upaya pemberontakan Kurdi terhadap Pemerintahan Irak.

### **1.8.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dengan perspektif konstruktivisme selalu menggunakan *structural approaches* yang berfungsi untuk mendefinisikan interaksi agen dalam struktur sosial. Pendekatan ini juga berfungsi menjelaskan dampak dari struktur, memberikan pemahaman sosial, sejarah, atau *spatial condition*<sup>51</sup>. Dengan kata lain bahwa fenomena sosial tidaklah bersifat *given*, namun terkonstruksi dalam struktur sosial yang bersumber dari interaksi antar agen.

---

<sup>51</sup> Cecep Zakarias. *Op.cit.* hal 83. *Spatial Condition* adalah kondisi pada tempat dan waktu tertentu.

Irak adalah agen yang menjalankan kebijakannya. Sehingga agen lain dalam struktur yang ada baik internasional maupun domestik akan merespon ide yang dibawa oleh negara tersebut, khususnya Etnis Kurdi. Seperti halnya dalam penelitian ini. Ketika Irak merdeka sebagai negara bangsa dan memasukkan Kurdi ke dalam wilayahnya hingga arabisasi memunculkan perlawanan dari Kurdi untuk keluar dari negara tersebut.

### **1.8.3. Tingkat dan Unit Analisa**

Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah negara. Walaupun teridentifikasi adanya upaya lintas batas negara dan kerjasama internasional, namun interaksi yang terjadi antaragen sebagai unit analisa lebih mempengaruhi struktur sosial di dalam negara Irak. Agen yang dimaksud adalah Pemerintah Irak, Amerika Serikat dan Etnis Kurdi di Irak, sedangkan struktur yang dibentuk adalah lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat posisi dan kondisi Kurdi sebagai etnis minoritas di Irak.

### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, teknik yang peneliti gunakan adalah telaah pustaka atau studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku-buku, jurnal, dokumen, majalah dan artikel-artikel, media elektronik serta pencarian informasi melalui internet.<sup>52</sup> Data-data tersebut berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi.

---

<sup>52</sup> Yanuar Ikbar. *Op.cit.* hal 156

### 1.8.5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka pengolahan data akan dilakukan dengan interpretasi pemahaman (subjektif).

Konstruktivis setuju bahwa tidak semua penafsiran terhadap suatu masalah sama. Konstruktivis menerima bahwa inkohereni empiris akan merusak interpretasi. Sehingga para peneliti konstruktivis berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber dengan memeriksa satu persatu dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi melakukan validitas data melalui 3 cara, yaitu melalui pandangan umum (*the world-view piece*), pandangan secara kontekstual teori yang sudah ada (*the learning theory piece*), dan melalui pandangan yang didapat selama proses penelitian (*the research piece*).<sup>53</sup>

Data-data terkait kebijakan Irak terhadap Etnis Kurdi tahun 1979-2013 akan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi.

## 1. 9. Sistematika Penulisan

**Bab I**, Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, studi pustaka sebagai acuan, metodologi dalam penelitian, sistematika penulisan skripsi serta peta pemikiran.

**Bab II**, Dalam bab ini peneliti akan menggambarkan *sub-state identity* di Irak dan kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi pada tahun 1979-2013.

---

<sup>53</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch. *Op.cit.* hal 20

**Bab III**, Dalam bab ini peneliti akan menganalisis kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi dari tahun 1979-2013 sebagai bentuk *practice* dalam interaksi antar agen

**Bab IV**, Dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan terkait bagaimana kebijakan Pemerintah Irak terhadap Etnis Kurdi, beserta saran dari peneliti untuk pembaca maupun pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini.